



PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH: STUDI EMPIRIS ATAS KORELASI RESIPROKAL

Hasna Imtiyaz Hanifah, Agus Sunarya Sulaeman*
Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the reciprocal effect between economic growth and local own-source revenue. The research scope of this study is based on Java—Bali region in 2015—2019. Using purposive sampling, the data used in this research is taken from the DJPK and BPS websites. The method of this study is analyzed with the two-stage least square (2SLS) panel data regression method with cross-section random effect model as well as white-cross section covariance coefficient in the GDRP equation and period weights (PCSE) in the LOR equation. This research managed to prove the significant positive reciprocal effect between economic growth and LOR. Other factors related such as General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, and HDI in the GDRP equation also have a significant positive influence on economic growth. Meanwhile, labor, local taxes, and local retributions variables also own similar result on LOR. However, Special Allocation Fund and population has significant negative effect on economic growth and LOR, respectively. Moreover, capital expenditure with a lag of two years shows a negative and insignificant effect on economic growth.

Keywords: *Reciprocal; Economic Growth; Local Own-Source Revenue; Fiscal Balance Fund; Capital Expenditure.*

JEL Classification: *H71, H72*

PENDAHULUAN

Hakikat pembangunan nasional sejatinya telah disebutkan secara implisit dalam alinea IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. Sebagai langkah pencapaian tujuan bangsa ini, presiden menyatakan dalam RPJMN 2015—2019 bahwa Indonesia harus mampu mengatasi berbagai tantangan utama pembangunan. Tantangan ini terdiri atas keberlanjutan pembangunan, percepatan keadilan dan pemerataan, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Data Produk Domestik Bruto dalam kurun lima tahun tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih tertahan stagnan pada level 5% dari target RPJMN senilai 8%. Belum terjawabnya tantangan pembangunan ini juga terlihat pada nilai PDB tahun 2019 sebesar 5,02%, lebih rendah jika dikomparasikan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,17% serta target APBN 2019 pada angka 5,03%. Kondisi tak jauh berbeda juga terlihat pada capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam tingkat daerah. Meskipun demikian, akumulasi atas nilai PDRB Pulau

*Corresponding Author: Agus Sunarya Sulaeman, Politeknik Keuangan Negara STAN Sektor V, Jl. Bintaro Utama 5, Jurang Manggu Tim., Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222, asunarya@pknstan.ac.id



Jawa dan Bali selalu meningkat tiap tahunnya. Peningkatan atas regional ini melebarkan disparitas atas perekonomian yang tidak merata dibandingkan wilayah lain. Hal ini disebabkan bahwa pada rentang waktu 2016—2019, wilayah Jawa dan Bali menyumbang tingkat PDRB pada kisaran 59,04%—60,05%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pulau Jawa dan Bali telah mendominasi secara masif atas pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Atas fenomena ketimpangan ini, pemerintah pusat sesungguhnya telah menyelenggarakan otonomi daerah atau pelimpahan sebagian kewenangan kepada daerah berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai implementasi riil atas dilaksanakannya otonomi daerah, pemerintah daerah melaksanakan optimalisasi atas pendapatan asli daerah (PAD) yang juga berfungsi sebagai komponen penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Dilakukannya optimalisasi terhadap PAD ini juga sudah sejalan dengan sembilan prioritas pembangunan lima tahun (Nawacita) tahun 2014, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Selaras dengan hasil pertumbuhan ekonomi daerah, nilai realisasi PAD pada Pulau Jawa dan Bali juga mampu berkontribusi secara signifikan apabila dibandingkan dengan luar wilayah tersebut. Pada tahun 2015, daerah Jawa dan Bali berhasil merealisasikan PAD pada angka 50,65% dari keseluruhan jumlah nilai PAD di Indonesia. Nilai ini kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 68,71% dan 2017 menjadi 68,89% untuk selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 67,55%, dan 67,35% secara berurutan. Hal ini memunculkan lebih banyak gap yang substansial pada realisasi PAD Jawa dan Bali dengan wilayah lain.

Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah senantiasa menduduki peringkat empat besar PAD tertinggi di Indonesia pada rentang tahun 2015—2019. Peringkat ini kemudian disusul Provinsi Banten mulai tahun 2016. Di sisi lain, DI Yogyakarta dalam status IKF sebagai daerah “Menuju Kemandirian” terus berupaya memaksimalkan pelayanan pajak dan pemanfaatan kekayaan daerah, memperbaiki kualitas SDM pengelola pendapatan daerah, menggali sekaligus mengoptimalisasi sumber penerimaan daerah, serta meningkatkan fasilitas pendukung seperti tercantum pada Nota Kesepahaman Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY dengan PT. Bank BPD DIY tentang Optimalisasi Pendapatan Daerah (PAD) pada tahun 2019. Provinsi Bali sendiri sebagai salah satu pusat pariwisata terbesar di Indonesia memiliki keberagaman budaya dan ciri khas yang unik sehingga penggalan potensi pajak daerah dan retribusi daerah melalui sektor pariwisata dapat dikatakan tinggi. Hal ini didukung dengan fakta bahwa nilai realisasi PAD Provinsi Bali pada tahun 2019 yakni berkisar pada angka Rp4,2 triliun sudah melampaui angka target Rp3,6 triliun dan meningkat menjadi 105% dibandingkan tahun anggaran yang lalu. Secara umum, daerah-daerah yang terdapat pada Pulau Jawa dan Bali telah dapat dikatakan mandiri secara keuangan serta mempunyai posisi kuat dalam menarik penerimaan asli daerah.

Meningkatnya realisasi PAD dalam kluster Jawa dan Bali telah selaras dan berhasil diimbangi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Dominasi Pulau Jawa dan Bali dalam menumbuhkan perekonomian digerakkan melalui kemudahan infrastruktur dan sarana prasarana pada berbagai daerah, sektor perindustrian yang senantiasa bergerak, dan iklim pariwisata yang sejalan pula dengan realisasi PAD.



Adanya hubungan yang selaras antara pertumbuhan ekonomi dengan PAD telah dikemukakan oleh Saragih (2003), yaitu makin meningkatnya penghasilan per kapita, maka kemampuan membayar pungutan pemerintah juga akan meningkat. Secara makro, semakin tinggi nilai PDRB yang didapatkan, semakin tinggi pula kapasitas yang dimiliki daerah untuk menggali potensi yang ada. Penerimaan daerah yang meningkat akan berimplikasi pada harapan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan produktivitas masyarakat pada sektor perekonomian yang terus bertumbuh, keadaan ini pada akhirnya akan memberikan *multiplier effect* untuk pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui produk domestik regional bruto.

Untuk menutupi kekurangan pendanaan atas pembangunan ekonomi di daerah, pemerintah daerah juga mengandalkan sumber keuangan lain di luar penerimaan asli daerah. Atas dasar hal tersebut, pemerintah pusat melalui UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah memberikan sejumlah alokasi dana perimbangan berdasarkan porsi kebutuhan dan prioritas nasional. Dana perimbangan di Indonesia terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Realisasi dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah otonom bukan dilaksanakan untuk menciptakan ketergantungan fiskal dan finansial, melainkan bertujuan sebagai stimulus pemerintah daerah agar dapat melaksanakan optimalisasi PAD secara lebih baik.

Sektor pengeluaran juga berperan penting dalam mendukung perekonomian dan kemandirian daerah di samping melalui sektor pendapatan. Dilaksanakannya realisasi belanja secara efektif, efisien, dan ekonomis akan turut membantu pembangunan pada suatu daerah secara substansial, khususnya belanja modal. Ketersediaan infrastruktur sebagai wujud nyata realisasi belanja modal adalah prioritas alokasi anggaran dalam rangka menutupi kebutuhan pembangunan (Christy & Adi, 2009). Tidak hanya melalui pengadaan sarana prasarana, pelayanan publik yang lebih baik serta peningkatan produktivitas melalui pembangunan sejatinya juga bermula dari sektor pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan keberadaan sumber daya manusia dengan kualitas mumpuni akan sangat berperan dalam merumuskan strategi dan regulasi terkait pembangunan nasional dan daerah (Mirza, 2011). Dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia, PBB mencetuskan *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia dengan pendekatan tiga dimensi dasar, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak (BPS, 2021).

Sejalan dengan aspek kualitas, aspek kuantitas pun tidak kalah menentukan bagaimana pembangunan manusia akan berjalan. Batik (2013) menyatakan bahwa populasi mampu mendefinisikan skala produksi daerah, salah satu contohnya yakni efisiensi sumber daya akan terganggu bila jumlah penduduk terlalu sedikit. Berlawanan dengan hal tersebut, pemanfaatan sumber daya yang terlalu efisien akan berpengaruh pada efektivitas tujuan pembangunan yang dinikmati menjadi lebih kecil (Rosyidi, 2000). Kondisi ini tidak berlaku di Pulau Jawa mengingat 56,86% penduduk Indonesia terkonsentrasi di wilayah ini. Tingginya jumlah penduduk di Pulau Jawa menyebabkan terjadinya peningkatan *supply* atas tenaga kerja, yaitu 47,61% dari keseluruhan populasi di Pulau Jawa. Akan tetapi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



(TPAK) Bali, pada tahun 2019 justru menurun dari angka 76,78% menjadi 73,87% karena kurang terserapnya tenaga kerja berpendidikan. Meskipun demikian, sesungguhnya kuantitas sumber daya manusia di Jawa dan Bali sudah sangat memenuhi kriteria untuk mendukung penarikan pendapatan asli daerah. Jumlah penduduk dan tenaga kerja yang lebih banyak berimplikasi pula pada wajib pajak dan wajib retribusi yang lebih banyak. Secara kumulatif, nilai pajak daerah di Jawa dan Bali memang selalu meningkat setiap tahunnya, tetapi hal ini belum dapat diimbangi dengan retribusi daerah yang cenderung fluktuatif. Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah berupaya untuk lebih merealisasikan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan otonomi yang bertanggung jawab, berdampak nyata, dan berkemampuan untuk mendukung kemandirian daerah.

Pulau Jawa—Bali dipilih sebagai lokus penelitian karena fenomena ketimpangan, baik pada pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan asli daerah, yang terjadi atas wilayah Jawa dan Bali belum mampu terpotret sepenuhnya dalam penelitian terdahulu. Padahal, capaian pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah pada Pulau Jawa—Bali dalam kurun waktu 2015—2019 mendominasi nilai secara nasional. Analisis korelasi resiprokal pada pertumbuhan ekonomi dan PAD menggunakan metode 2SLS data panel dipilih karena korelasi resiprokal antara pertumbuhan ekonomi dengan perspektif penerimaan daerah, yang diprosksikan dengan PAD, belum pernah diuji dalam penelitian sebelumnya dalam skala kedaerahan di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya perspektif khazanah pengetahuan, utamanya terkait hubungan resiprokal/timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks/variabel pembangunan ekonomi lainnya seperti kemiskinan (Jonnadi et al., 2012), kesejahteraan (Ezkirianto & Findi, 2013), dan belanja daerah (Imamah, 2018). Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengujian dengan judul “Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah: Studi Empiris Atas Korelasi Resiprokal”.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Agency theory atau teori keagenan lahir sebagai solusi atas permasalahan keagenan (*agency problem*) berupa perbedaan sudut pandang *principal* dan *agent* ketika menghadapi risiko (Ernati, 2009) serta keberadaan konflik kepentingan yang timbul akibat tidak selarasnya tujuan dan harapan kedua pihak tersebut (Firmansyah et al., 2020). Dalam *agency theory*, dijelaskan bahwa *principal* memberikan porsi kewenangan kepada *agent* untuk mengambil keputusan serta mendelegasikan penugasan terkait jasa tertentu sesuai otoritas (Halim & Abdullah, 2006). Teori ini kemudian dilandaskan dengan beberapa asumsi, seperti *self interest* ketika egosentrisme individu berusaha menguntungkan diri sendiri, *bounded rationality* yakni keterbatasan logika manusia atas keterjadian di masa depan, dan *risk averse* atau keinginan untuk menghindar dari risiko (Eisenhardt, 1989).

Pada skala pemerintahan, peran *principal* dijalankan oleh pemerintah pusat sedangkan *agent* dalam ranah publik dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kedua peran ini sangat erat kaitannya dengan otonomi daerah, yakni ketika pemerintah pusat



menyerahkan sebagian urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus kepentingan sendiri. Dalam hal ini, pemerintah pusat sebagai *principal* menyalurkan dana perimbangan yang menjadi hak daerah sebagai *agent* untuk membantu membiayai dilaksanakannya desentralisasi dan otonomi daerah (Santoso, 2018). Di sisi lain, kewenangan *principal* juga dapat diperankan oleh rakyat dengan pemerintah daerah berfungsi sebagai *agent*. Sumber daya manusia berupa tenaga kerja yang berasal dari masyarakat turut mendukung tercapainya target penerimaan daerah. Selain itu, pungutan yang ditarik dari rakyat berupa pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber daya keuangan *principal* nantinya akan dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai *agent* untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat.

Fiscal Federalism

Fiscal federalism merupakan teori yang menghubungkan tingkat pemerintah yang berjenjang dalam lingkup keuangan. Pemerintah dengan otoritas yang lebih tinggi memiliki kuasa untuk menetapkan kebijakan fiskal dan finansial yang bersifat *top-down*, sebagai contoh yakni adanya distribusi pendapatan pada tingkat pusat kepada level subnasional atau lokal. Distribusi pendapatan ini juga merupakan salah satu peran bagi pemerintah dalam menjaga kestabilan agregat atas ekonomi makro untuk kemudian mengalokasikan keberadaan sumber daya kepada masyarakat (Rostow & Musgrave, 1996, dikutip dalam Chandra, 2013).

Apabila dihubungkan dalam kaidah perekonomian, *fiscal federalism* menjelaskan bahwa tumbuhnya ekonomi di daerah dapat terlaksana dengan penerapan desentralisasi sesuai kaidah otonomi daerah (Kresnandra, 2016). Hal ini harus dilaksanakan dengan tepat agar mampu mendukung efisiensi sumber daya sebab pemerintah daerah lebih memahami ciri khas serta kebutuhan pelayanan publik dibandingkan otoritas pusat (Zhang & Zou, 1998). Efisiensi ini selanjutnya dapat berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi tingkat daerah yang nantinya ikut berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara nasional (Sulaeman & Silvia, 2019).

Desentralisasi Fiskal

Sebagai turunan dari teori *fiscal federalism*, desentralisasi fiskal juga menekankan pada pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah dalam ranah keuangan publik dan pelayanan pemerintah (Tanzi, 1995). Penyerahan kekuasaan ini terkait pula dengan hubungan fiskal seperti optimalisasi pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan daerah serta tanggung jawab atas regulasi (Vo, 2010). Pada pelaksanaannya, dana transfer sebagai wujud desentralisasi fiskal diharapkan mampu menumbuhkan iklim kompetisi dalam sistem penyediaan barang dan jasa publik antarpemerintah daerah. (Sabilla & Jaya, 2014). Kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan mampu tercipta melalui mekanisme dana perimbangan. Dana perimbangan ini terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Umum (DAU) berasal dari pendapatan APBN yang disalurkan untuk membiayai kebutuhan daerah sebagai bentuk dilaksanakannya desentralisasi. Sifat DAU sebagai *block grant* memungkinkan daerah untuk bebas menggunakan

dana sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing. DAU juga berfungsi sebagai penyeimbang horizontal untuk menambal celah fiskal serta mengurangi kesenjangan sarana dan prasarana infrastruktur demi kondisi ekonomi yang merata (Suputra & Dewi, 2017).

Dana Alokasi Khusus (DAK) berasal dari pendapatan APBN yang disalurkan untuk membiayai kegiatan khusus daerah sesuai prioritas nasional. Peran DAK sebagai *special grant* dialokasikan pada pemerintah daerah dengan akuntabilitas rendah, berfokus pada standar pelayanan dasar, dan diprioritaskan dalam lingkup infrastruktur, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, dan pertanian (Elsivera & Abdillah, 2017; Sulaeman & Andriyanto, 2021). DAK terbagi menjadi DAK Fisik yang dimanfaatkan khusus untuk pembangunan infrastruktur dan DAK Nonfisik untuk kegiatan khusus nonfisik.

Dana Bagi Hasil (DBH) berasal dari pendapatan APBN yang disalurkan atas persentase tertentu untuk membiayai kebutuhan daerah sebagai bentuk dilaksanakannya desentralisasi. Fungsi DBH sebagai penyeimbang vertikal antara pemerintah pusat dan daerah berasal dari pendapatan pajak dan SDA yang akan dibagihasilkan. Besaran DBH telah ditentukan dalam undang-undang sesuai potensi daerah penghasil, dengan ketentuan bahwa proporsi daerah penghasil akan lebih tinggi nilainya bila dikomparasikan dengan daerah lain yang hanya memperoleh pemerataan.

Pertumbuhan Ekonomi

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa teori yang berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, seperti Model Pertumbuhan Solow, Teori Harrod-Domar, Teori Pertumbuhan Endogen, Teori Rostow, dan Teori Lucas (Maulana, 2015). Adam Smith melalui paradigma ekonomi klasik mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh meluasnya pasar akibat meningkatnya populasi, sementara Todaro (2000) menjelaskan bahwa di samping sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi juga turut disokong oleh adanya penambahan modal, fisik, dan teknologi yang semakin mumpuni. Berdasarkan hal tersebut, maka definisi dari pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan produksi barang dan jasa akibat kegiatan perekonomian yang senantiasa berkembang (Sukirno, 2000). Dalam jangka panjang, pertumbuhan keluaran perkapita akibat kemajuan aktivitas kegiatan perekonomian juga ikut mendukung pertumbuhan ekonomi (Boediono, 1981).

Pertumbuhan ekonomi mampu menjadi indikator atas perkembangan pembangunan perekonomian, seperti peningkatan sarana prasarana pendidikan, pembangunan infrastruktur, penambahan barang produksi. Pengukuran terhadap pertumbuhan ekonomi secara agregat dapat dilakukan dengan memanfaatkan proksi Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*). Pada cakupan daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan sebagai tolok ukur kesejahteraan wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku diamati untuk melihat dampak perubahan harga komoditas pada struktur perekonomian. Di sisi lain, PDRB atas dasar harga konstan berusaha menghilangkan pengaruh inflasi dalam membandingkan pertumbuhan ekonomi setiap tahun (Susanti, 2013).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah berasal dari sumber perekonomian asli daerah, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, pinjaman lain-lain, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terdiri dari bagian deviden, laba, dan penjualan saham milik daerah (Widjaja, 2002). PAD berperan sebagai indikator kemandirian daerah pada pelaksanaan desentralisasi fiskal (Sidik, 2002). PAD dimanfaatkan sebagai penerimaan untuk pelaksanaan belanja daerah sehingga peningkatan nilai PAD perlu dilaksanakan dengan menggali potensi daerah, mengelola pendapatan dengan efisien dan efektif, serta melibatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatannya. Pada akhirnya, hal ini akan mendukung nilai PAD dalam berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Rahman, 2012).

Pajak daerah dan retribusi daerah dianggap mampu berpengaruh secara substansial atas perannya sebagai komponen penyusun PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah cenderung mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan nilai PAD (Horota *et al.*, 2017). Pajak daerah merupakan pajak yang ditarik oleh daerah berdasarkan peraturan daerah untuk mendanai keperluan daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan pengaruh langsung (Mardiasmo, 2004). Berkebalikan dengan pajak daerah, retribusi daerah memberikan kontraprestasi atau imbalan langsung kepada masyarakat terkait pembayaran atas jasa atau pelayanan pemerintah (Saragih, 2003, dikutip dalam Nusa *et al.*, 2015). Meskipun memiliki keberdampakan yang berbeda, pemerintah daerah terus mengoptimalkan PDRD secara simultan melalui intensifikasi serta ekstensifikasi subjek dan objek sesuai ketentuan secara profesional dan transparan dalam mendukung kontribusi PAD secara lebih baik (Halim & Abdullah, 2006).

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk membangun dan mengadakan aset tetap yang terdiri dari infrastruktur, fasilitas, dan sarana prasarana (Pradnyantari & Dwirandra, 2017). Jenis aset tetap yang dibangun melalui belanja modal harus memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan, baik yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat (e.g. jembatan, jalan, mobil ambulans untuk umum) maupun tidak langsung (e.g. kantor pemerintah, mobil dinas, gedung dewan). Belanja modal pemerintah pusat dialokasikan ke daerah sebagai usaha meningkatkan produktivitas melalui investasi pada aset tetap (Pradana & Sumarsono, 2018). Upaya dapat berupa perbaikan fasilitas dan kualitas pelayanan publik secara kontinu melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana lainnya (Bati, 2009). Pernyataan ini telah selaras dengan konsep yang ditawarkan Rostow dan Musgrave (1996), yakni pola belanja modal pada sektor investasi pemerintah mendukung terlaksananya tahap awal pembangunan ekonomi. Hal ini pada akhirnya akan berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah.



Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* merupakan sebuah standar ukur atas ketercapaian pembangunan manusia dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas hidup (Christy & Adi, 2009). Ramirez *et al.* (1988) mengemukakan hubungan antara IPM dengan pertumbuhan ekonomi, yakni bahwa abilitas masyarakat dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendukung tumbuhnya perekonomian dikaitkan dengan keberadaan pembangunan sektor manusia yang juga tinggi, contohnya pada sektor teknologi. Di samping itu, IPM digunakan untuk mengamati keberhasilan kebijakan ekonomi makro atas kualitas hidup rakyat (Davies & Quinlivan, 2006). Atas dasar tersebut, tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik dapat dipercepat apabila terdapat peningkatan kualitas pada sektor pemerataan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perbaikan standar kelayakan hidup masyarakat.

Jumlah Penduduk

Menurut Said (2012), penduduk adalah sekumpulan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu akibat fenomena demografi berupa kelahiran, kematian, dan perpindahan domisili masyarakat. Jumlah penduduk dapat memberikan implikasi atas penerimaan suatu daerah. Adam Smith dalam Santoso & Rahayu (2005) menjelaskan bahwa adanya peningkatan pada volume populasi akan menciptakan perluasan pasar, meningkatkan nilai tabungan, dan meluasnya skala produksi sehingga akan memberikan nilai tambah pada *output* perekonomian. Katalisator atas pertumbuhan ekonomi ini akan berdampak pada pembangunan sehingga jumlah penduduk yang senantiasa tumbuh akan mampu turut meningkatkan nilai penerimaan yang diharapkan dapat dipungut dari masyarakat (Priyono, 2016). Akan tetapi, Astuti & Astika (2016) berpendapat bahwa pertumbuhan jumlah penduduk dapat membebani pembangunan. Tingginya populasi memaksa mereka untuk menuntut kualitas layanan, bantuan sosial, dan tanggung jawab publik yang makin besar Dengah *et al.* (2014). Selain itu, pungutan pajak dan retribusi yang diharapkan dapat ditarik ternyata tidak mampu teroptimalisasi akibat banyaknya penduduk dengan pendapatan perkapita rendah. Kedua pernyataan yang saling bertolak belakang ini sejatinya menjadi tantangan untuk pemerintah daerah dalam mengelola bonus kuantitas sumber daya manusia agar memberikan manfaat positif pada penarikan penerimaan asli daerah.

Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah banyaknya penduduk berusia 15—64 tahun yang berkemampuan dalam memproduksi barang dan jasa berdasarkan *demand* dan tingkat partisipasi mereka dalam aktivitas perekonomian (Mulyadi, 2003). Subri (2003) mengemukakan bahwa terlaksananya produksi atas barang dan jasa sangat dipengaruhi atas permintaan tenaga kerja yang berasal dari jumlah penduduk. Populasi yang tinggi pada suatu daerah akan menyediakan jumlah angkatan kerja yang juga tinggi sehingga tenaga kerja yang ditawarkan juga turut besar (Latif & Soesatyo, 2014). Lebih jauh lagi, banyaknya jumlah penduduk dapat mendorong tingkat produksi dan meluaskan cakupan pasar domestik melalui faktor sumber daya

manusia yang ikut bekerja (Nalle & Hidayat, 2015). Atas keterkaitan tenaga kerja dengan jumlah penduduk, maka dapat dipastikan bahwa pertumbuhan tenaga kerja juga memberikan implikasi atas meningkatnya penerimaan daerah.

Penelitian Terdahulu

Pada studi yang dilakukan Sulaeman & Silvia (2019) terhadap kabupaten/kota di Indonesia tahun 2013—2017, telah ditemukan pengaruh positif pada PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, Elsilvera & Abdillah (2017) justru menemukan pengaruh sebaliknya atas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu tahun 2009—2015. Hasil ini juga didukung dengan pengujian Suputra & Dewi (2017). Implikasi atas pembalikan peran kedua variabel ini telah banyak dilakukan pula, yakni oleh Muchtolifah (2010) dan Priyono (2016) yang mampu menunjukkan peningkatan PAD oleh pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, proporsi PAD yang senantiasa meningkat dapat diartikan sebagai pencapaian kemandirian pertumbuhan ekonomi regional. Demikian pula sebaliknya, PDRB selaku proksi pertumbuhan ekonomi berhasil mendeskripsikan kesejahteraan penduduk yang dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Dalam konteks dana perimbangan, Elsilvera & Abdillah (2017) mengamati adanya pengaruh positif atas DAU serta pengaruh negatif atas DAK terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Sulaeman & Silvia (2019) juga mampu membuktikan hubungan positif DAU serta DBH terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU merupakan alokasi terbesar yang diberikan pemerintah pusat sesuai perannya sebagai *remedy* atas *horizontal imbalance* antardaerah untuk selanjutnya dimanfaatkan secara fleksibel oleh tiap daerah. Di lain pihak, DAK yang dialokasikan secara khusus bagi regional tertentu, seperti digunakan dalam urusan fisik kedaerahan, diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sebagai tambahan, DBH sebagai pengembalian pendapatan atas pajak dan SDA juga diarahkan dapat memberikan manfaat serupa pada kesejahteraan.

Apabila melihat pembangunan sektor fisik, Asngari (2015), Pradana & Sumarsono (2018), dan Sulaeman & Silvia (2019) berhasil melihat dampak positif belanja modal pada pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pengaruh ini tidak dapat dibuktikan pada penelitian Suputra & Dewi (2017). Pendanaan infrastruktur yang diakomodasi oleh belanja modal dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana umum. Pada akhirnya, hal ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, baik dalam aktivitas perekonomian maupun pembangunan manusia. Dalam kacamata ini, penelitian 2SLS milik Ezkiriyanto & Findi (2013), Dewi & Sutrisna (2014), dan Izzah (2015) mendukung peran IPM terhadap optimalisasi pertumbuhan ekonomi.

Sebagai indikator sosial, jumlah penduduk terhadap PAD memberikan implikasi hasil yang berbeda. Penelitian Astuti & Astika (2016) menunjukkan pengaruh negatif atas hal ini, tetapi penelitian Sari (2016) dan Hendriyani (2017) menunjukkan hasil sebaliknya. Ini selaras dengan realita bahwa besaran pendapatan dipengaruhi peningkatan dan penurunan penduduk akibat tingkat produktivitas tenaga kerja dan perluasan skala produksi ekonomi. Mendukung hasil tersebut, Muchtolifah (2010) serta Koesmulyadi (2017) berhasil menguji pengaruh positif tenaga kerja pada

PAD. Hal ini telah sesuai dengan pernyataan Steven & McGowen (1983) yang kemudian dijamin oleh Mardiasmo (2004), tenaga kerja yang meningkat sanggup berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan masyarakat yang akhirnya mampu mendukung kenaikan PAD.

Penelitian Kusuma & Wirawati (2013) dan Rochimah *et al.* (2015) berhasil menemukan pengaruh signifikan positif pada pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. Akan tetapi, penelitian Pramarta & Aswitari (2018) hanya berhasil membuktikan efek positif pajak daerah tetapi tidak halnya dengan retribusi daerah yang justru tidak berpengaruh atas PAD. Pajak daerah menjadi komponen penyusun terbesar atas persamaan PAD. Di sisi lain, meskipun dengan akumulasi yang berbeda jauh, retribusi daerah tetap merupakan salah satu penyusun langsung yang dapat mempengaruhi PAD.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka atas teori yang digunakan dan penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan untuk ditelaah lebih lanjut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pengaruh resiprokal antara pertumbuhan ekonomi dan PAD:

- H₁: PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H₂: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap PAD.

Pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi:

- H₃: DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H₄: DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H₅: DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh jenis pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi:

- H₆: Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H₇: IPM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh indikator sosial terhadap PAD

- H₈: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD.
- H₉: Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap PAD.

Pengaruh komponen PAD terhadap PAD

- H₁₀: Pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD.
- H₁₁: Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap PAD.

METODE PENELITIAN

Gambaran Umum dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dijalankan dengan pendekatan kuantitatif-eksplanatoris. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Data mengenai pertumbuhan ekonomi diambil dari nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 sesuai dengan penelitian Sulaeman & Silvia (2019) pada publikasi BPS yang tercantum dalam situs web instansi tersebut. Demikian halnya dengan data mengenai IPM, jumlah penduduk, dan tenaga kerja yang juga diperoleh melalui situs BPS daerah



masing-masing. Di lain pihak, realisasi atas PAD, pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, belanja modal, serta total aset sebagai ukuran pemerintah daerah diperoleh melalui laporan realisasi dan neraca APBD yang terdapat pada situs web DJPK Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, pengolahan serta analisis data dijalankan dengan metode data panel, yaitu kombinasi dari deret waktu (*time-series*) pada rentang 2015—2019 dan data silang (*cross-section*) berupa 120 kabupaten/kota di wilayah Jawa dan Bali. Dari populasi ini kemudian ditetapkan sampel penelitian yang didasarkan pada kriteria spesifik (*purposive sampling*) atas seluruh populasi kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali. Perangkat lunak yang diaplikasikan yakni pengolah data statistik *Eviews Enterprise Edition 10.0*.

Operasionalisasi Variabel

Berdasarkan data yang tersedia, variabel yang ditentukan penggunaannya dalam penelitian ini terdiri atas variabel endogen dan variabel *predetermined*. Dalam 2SLS, variabel endogen memiliki peran yang serupa dengan variabel terikat pada salah satu model dalam sistem persamaan simultan, tetapi mampu menjadi variabel bebas dalam model yang lain pada sistem serupa. Pertumbuhan ekonomi dan PAD menjadi variabel endogen dalam penelitian ini. Di sisi lain, variabel *predetermined* pada 2SLS adalah jenis peubah yang telah ditentukan penggunaannya dan bersifat mempengaruhi model selayaknya variabel bebas. Jumlah penduduk, tenaga kerja, pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK, DBH, belanja modal, dan IPM menjadi variabel *predetermined* dalam penelitian ini.

Variabel Endogen yang memiliki fungsi serupa dengan variabel dependen dalam penelitian terdiri dari Variabel Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan asli daerah. Variabel Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas produksi dalam memperoleh keluaran tambahan dalam skala regional maupun nasional, diukur dengan membandingkan capaian PDB tahun berjalan dengan tahun anggaran sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan jenis pemasukan daerah yang dipungut sesuai regulasi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, diukur dengan nilai realisasi PAD yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota dalam satuan miliar rupiah.

Variabel *predetermined* yang memiliki fungsi serupa dengan variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari DAU, DAK, DBH, belanja modal, IPM, jumlah penduduk, tenaga kerja, pajak daerah, dan retribusi daerah termasuk juga Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli daerah sebagai variabel yang saling mempengaruhi. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah jenis dana perimbangan kepada daerah dalam mendukung pemerataan kemampuan pengelolaan keuangan daerah guna membiayai kebutuhannya sendiri sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi, indikator digunakan realisasi transfer DAU per daerah dalam satuan miliar rupiah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan jenis dana perimbangan APBN yang diperuntukkan hanya kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk meringankan biaya yang timbul atas pelaksanaan aktivitas prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Nilai DAK menggunakan realisasi transfer per daerah dalam satuan miliar rupiah. Dana Bagi Hasil DBH merupakan jenis dana perimbangan APBN yang diperuntukkan kepada daerah



berdasarkan persentase tertentu dalam mendukung pembiayaan pengeluaran daerah sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi. Indikator DBH menggunakan realisasi transfer per daerah dalam satuan miliar rupiah. Belanja Modal Belanja modal merupakan belanja pemerintah untuk mengadakan, membeli, atau membangun aset yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan, diukur dengan nilai realisasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota menggunakan satuan miliar rupiah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kesejahteraan masyarakat diwakilkan dengan tiga dimensi kunci yang terdiri atas kesehatan, pengetahuan/pendidikan dan standar hidup layak. Indikator IPM menggunakan rata-rata geometrik atas indeks pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran. Indikator pendidikan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, indikator kesehatan diukur berdasarkan angka harapan hidup, serta indikator pengeluaran diukur berdasarkan nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Jumlah penduduk adalah semua penduduk yang terdapat pada kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali. Tenaga kerja adalah banyaknya angkatan kerja yang melakukan pekerjaan pada kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali. Pajak Daerah Pajak daerah merupakan semua pungutan wajib di luar pajak pusat, dengan proksi nilai realisasi pajak daerah pada tahun anggaran berjalan sebagai indikator. Retribusi Daerah merupakan pungutan yang sifat kontribusinya diterima langsung oleh pembayarnya di daerah, dengan proksi nilai realisasi retribusi daerah pada tahun anggaran berjalan pada laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota.

Jenis variabel *predetermined* lain yang berperan sebagai variabel kontrol terdiri atas ukuran pemerintah daerah dengan proksi total aset pada model pertumbuhan ekonomi, lokasi pemerintah daerah dengan proksi *dummy* (1=Jawa, 0=Bali) pada model PAD, dan jenis pemerintah daerah dengan proksi *dummy* (1=Kabupaten, 0=Kota) pada model PAD.

Metode Analisis Spesifikasi Model Persamaan Simultan

Melalui operasionalisasi variabel sebelumnya, model struktural regresi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut.

$$PDRB_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 PAD_{it} + \alpha_2 DAU_{it} + \alpha_3 DBH_{it} + \alpha_4 DAK_{it} + \alpha_5 BM_{i(t-2)} + \alpha_6 IPM_{it} + \alpha_7 UKURAN_{it} + e_{1it} \dots \dots \dots (i)$$

$$PAD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 JP_{it} + \beta_3 TK_{it} + \beta_4 PD_{it} + \beta_5 RD_{it} + \beta_6 LOKASI_{it} + \beta_7 JENISPD_{it} + e_{2it} \dots \dots \dots (ii)$$

Keterangan:

- | | |
|----------------------------------|---|
| PDRB = Pertumbuhan Ekonomi | PD = Pajak Daerah |
| PAD = Pendapatan Asli Daerah | RD = Retribusi Daerah |
| DAU = Dana Alokasi Umum | LOKASI = Lokasi Pemda |
| DAK = Dana Alokasi Khusus | UKURAN = Ukuran Pemda |
| DBH = Dana Bagi Hasil | JENISPD = Jenis Pemda |
| BM = Belanja Modal | α_0, β_0 = Konstanta/Intercept |
| IPM = Indeks Pembangunan Manusia | $\alpha_i, \beta_i, i > 0$ = Koefisien |
| JP = Jumlah Penduduk | e_{1it}, e_{2it} = Galat |
| TK = Tenaga Kerja | |

Selanjutnya, kedua persamaan struktural yang telah disusun akan dikonversi dalam bentuk tereduksi (*reduced form*) guna menguraikan variabel endogen dalam himpunan fungsi *error* stokastik dan variabel *predetermined* sehingga ekuasi yang ada menjadi konsisten dan tidak bias, sebagai berikut.

$$PDRBit = \Pi_0 + \Pi_1PADit + \Pi_2DAUit + \Pi_3DAKit + \Pi_4DBHit + \Pi_5BMi(t-2) + \Pi_6IPMit + \Pi_7JPit + \Pi_8TKit + \Pi_9PDit + \Pi_{10}RDit + \Pi_{11}UKURANit + \Pi_{12}LOKASIit + \Pi_{13}JENISPDit + \epsilon_{1it} \dots \dots \dots (iii)$$

$$PADit = \Pi_{14} + \Pi_{15}PDRBit + \Pi_{16}JPit + \Pi_{17}TKit + \Pi_{18}PDit + \Pi_{19}RDit + \Pi_{20}DAUit + \Pi_{21}DAKit + \Pi_{22}DBHit + \Pi_{23}BMi(t-2) + \Pi_{24}IPMit + \Pi_{25}LOKASIit + \Pi_{26}JENISPDit + \Pi_{27}UKURANit + \epsilon_{2it} \dots \dots \dots (iv)$$

Uji Simultanitas Hausman

Munculnya indikasi atas terjadinya hubungan endogenitas dan simultanitas menyebabkan persamaan menjadi bias sehingga tidak dapat diuji menggunakan OLS. Oleh karena itu, dalam persamaan simultan, perlu dilaksanakan pengujian simultanitas menggunakan *Hausman's specification test* untuk menemukan pengaruh resiprokal atau saling timbal balik pada variabel PAD dan pertumbuhan ekonomi.

- H₀ : Tidak ada pengaruh simultanitas/timbal balik
- H₁ : Ada pengaruh simultanitas/timbal balik

Uji Identifikasi (*Order and Rank Condition*)

Selanjutnya, estimasi parameter dan metode terbaik pada persamaan simultan dilakukan menggunakan uji identifikasi. Pengujian ini terdiri dari dua metode, yakni pengujian *order condition* sebagai syarat perlu dan pengujian *rank condition* sebagai syarat cukup. Metode uji *order* tercantum dalam tabel III.1 berikut. Sementara itu, uji *rank* dilakukan dengan mencari determinan *subset* matriks koefisien variabel dari persamaan tereduksi. Jika ditemukan hasil identifikasi berlebih (*overidentified*) pada uji *order* dan determinan matriks pada uji *rank* tidak bernilai 0, maka persamaan yang diuji dikatakan berhasil teridentifikasi dengan metode 2SLS.

Tabel 1 Tabel Pengujian *Order Condition*

No	Kondisi	Hasil Identifikasi	Metode
1	(K-k) > (m-1)	<i>Unidentified</i>	-
2	(K-k) = (m-1)	<i>Exactly Identified</i>	ILS
3	(K-k) < (m-1)	<i>Overidentified</i>	2SLS

Sumber: Nachrowi & Usman (2006)

Keterangan:

- (K-k) = variabel *predetermined* yang dikeluarkan dari persamaan
- (m-1) = banyaknya variabel endogen dikurangi satu

Sebagaimana estimasi data panel pada umumnya, penelitian ini menerapkan uji *chow* dan *hausman* untuk menetapkan metode persamaan terbaik antara *common*

effect model (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM). Dalam uji *chow*, model CEM dipilih bila signifikansi $> 0,05$ dan sebaliknya, FEM dipilih bila $< 0,05$. Sedangkan dalam uji *hausman*, model REM dipilih bila signifikansi $> 0,05$ dan sebaliknya, FEM dipilih bila $< 0,05$. Setelah dipastikan telah melewati uji asumsi klasik berikut *remedy* yang diterapkan, maka selanjutnya perlu dilaksanakan pengujian regresi terpilih dan analisis hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi dan Uji Spesifikasi Model Persamaan Simultan

Pengujian spesifikasi *Hausman* menunjukkan probabilitas $0,0136 < 0,05$ sehingga ditolaknya H_0 untuk ketiadaan simultanitas menunjukkan adanya hubungan resiprokal atau saling timbal balik pada PAD dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2 Hasil Pengujian Spesifikasi *Hausman*

Variabel	Koefisien	Galat Standar	t-Statistic	Prob.
RESIDUAL	-0.001002	0.000405	-2.47552	0.0136

Sumber: Diolah dari Data Penulis

Selanjutnya, pengujian *order* pada persamaan PAD dengan $K-k=12-6=6 > 2-1=1=m-1$ menunjukkan persamaan yang *overidentified*. Identifikasi berlebih juga berlaku untuk persamaan pertumbuhan ekonomi dengan $K-k=12-6=6 > 2-1=1=m-1$. Terakhir, determinan matriks tidak nol pada persamaan PAD dan pertumbuhan ekonomi dalam uji *rank* mencukupkan perlunya dilaksanakan pengujian 2SLS untuk kedua model.

Hasil Pemodelan Regresi Terpilih

Setelah dilakukan pemilihan model regresi data panel *random effects* dan pengujian asumsi klasik berikut pemilihan *covariance method* terbaik, didapatkan hasil pengujian 2SLS persamaan pertumbuhan ekonomi dan PAD sebagai berikut.

Tabel 3 Hasil Pengujian *White Cross-Section* 2SLS Persamaan Pertumbuhan Ekonomi

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Prob. One-Tailed
C	-38964.4	-1.85111	0.03235**
PAD	24.31998	10.13555	0.0000***
DAU	20.4375	2.358293	0.0094***
DAK	-4.08923	-1.56419	0.0592*
DBH	4.712056	2.070041	0.0195**
BM	-0.27511	-1.19513	0.1163
IPM	522.2348	1.987488	0.0237**
UKURAN	1.108646	6.732301	0.0000***
<i>Adjusted R²</i>	0.609415	<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000

*, **, *** adalah taraf signifikansi α senilai 10%, 5%, dan 1% secara berurutan.

Sumber: Diolah dari Data Penulis

Nilai signifikansi uji simultan $F 0,00000 < 0,05$ menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, DBH, BM, IPM, dan UKURAN mampu berpengaruh bersama-sama pada pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, nilai *adjusted R²* 0,613980 menjelaskan bahwa variabel PAD, DAU, DAK, DBH, BM, IPM, dan UKURAN mampu menggambarkan 61,398% atas pertumbuhan ekonomi. Adapun model pertumbuhan ekonomi terangkum dalam persamaan sebagai berikut.

$$PDRB_{it} = -38.964,4 + 24,31998PAD_{it} + 20,4375DAU_{it} - 4,08923DAK_{it} + 4,712056DBH_{it} - 0,27511BM_{i(t-2)} + 522,2348IPM_{it} + 1,108646UKURAN_{it}$$

Tabel 4 Hasil Pengujian *Period Weight PCSE* 2SLS Persamaan PAD

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Prob. One-Tailed
C	59.06571	2.199635	0.0141**
PDRB	0.000967	1.779645	0.0378**
JP	-0.014563	-1.322313	0.0933*
TK	0.171858	3.787541	0.0001***
PD	1.060503	49.07714	0.0000***
RD	0.903468	5.061176	0.0000***
LOKASI	16.2918	0.621679	0.2672
JENISPD	30.00966	1.752752	0.0401**
<i>Adjusted R²</i>	0.966193	<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000

*, **, *** adalah taraf signifikansi α senilai 10%, 5%, dan 1% secara berurutan.

Sumber: Diolah dari Data Penulis

Nilai signifikansi uji simultan $F 0,00000 < 0,05$ menunjukkan bahwa PDRB, JP, TK, PD, RD, LOKASI, dan JENISPD mampu berpengaruh bersama-sama pada pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, nilai *adjusted R²* 0,966193 menjelaskan bahwa variabel PDRB, JP, TK, PD, RD, LOKASI, dan JENISPD mampu menggambarkan 96,62% atas pertumbuhan ekonomi. Adapun model PAD terangkum dalam persamaan sebagai berikut.

$$PAD_{it} = 59,06571 + 0,000967PDRB_{it} - 0,014563JP_{it} + 0,171858TK_{it} + 1,060503PD_{it} + 0,903468RD_{it} + 16,2918LOKASI_{it} + 30,00966JENISPD_{it}$$

Analisis Resiprokal antara Pertumbuhan Ekonomi dan PAD

Pengujian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh resiprokal atau hubungan yang saling timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan PAD. Hal ini ditunjukkan pada kemampuan pertumbuhan ekonomi untuk mempengaruhi PAD secara positif signifikan seperti halnya kemampuan PAD untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sebagaimana telah terbukti didalam uji spesifikasi *Hausman*. Hasil pengujian menunjukkan adanya hubungan resiprokal antara pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah. Di samping itu, dari Pengujian *White Cross-Section* 2SLS terhadap dibuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan PAD saling berpengaruh pada dua persamaan.

Adapun pembahasan lebih lanjut terkait kedua hipotesis ini dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengaruh PAD pada Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian PAD terhadap pertumbuhan ekonomi telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan serta selaras dengan penelitian Sulaeman & Silvia (2019), Nalle & Hidayat (2015), Priambodo (2015), dan Park *et al.* (2019). Sesuai *agency theory*, diserahkannya kewenangan otonomi daerah oleh pemerintah pusat (*principal*) memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah (*agent*) untuk memperoleh pendapatan murni dari daerah asal. Dalam sudut pandang lain, rakyat dengan fungsinya sebagai *principal* menyerahkan sumber daya keuangan melalui pungutan daerah yang berasal dari PAD kepada pemerintah daerah sebagai *agent*.

Sebagai indikator kemandirian suatu daerah, penerimaan PAD yang besar membuktikan daerah berkemampuan secara finansial serta fiskal untuk melangsungkan pelayanan umum dengan mumpuni. Kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan serta didukung dengan birokrasi lancar akan berimplikasi pada kegiatan perekonomian yang meningkat. Hal ini dibuktikan dengan capaian rata-rata realisasi PAD tahun 2015—2019 sebesar Rp557,7692 miliar.

Meskipun total realisasi PAD Jawa dan Bali selalu mengalami peningkatan, tetapi pada kenyataannya, 77,5% daerah di Jawa Bali merealisasikan penerimaan asli daerah kurang dari akumulasi rata-ratanya. Pertumbuhan PAD yang menurun pada 2018 sebesar 7,68% juga dipicu oleh indikasi pemberian mahar dalam konteks politik untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah (Fathahillah, 2018). Atas dasar hal tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan *compliance* terkait pengelolaan atas penerimaan PAD untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, optimalisasi sumber pendapatan sesuai ciri khas dan potensi kedaerahan juga senantiasa perlu ditingkatkan agar mampu berdampak sebagai *multiplier effect* untuk totalitas pembangunan.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada PAD

Hasil pengujian pertumbuhan ekonomi terhadap PAD telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan serta selaras dengan penelitian Prana (2016), Susanto (2014), Desmawati *et al.* (2015), dan Rahmad *et al.* (2019). Sebagai *agent*, peningkatan sisi produksi dan pengeluaran pemerintah daerah berdasarkan iklim desentralisasi terus dilaksanakan untuk menciptakan peningkatan perekonomian sesuai amanat pemerintah pusat selaku *principal*. Pengembangan sarana pendidikan, peningkatan infrastruktur, serta pertambahan kuantitas dan kualitas produk industri dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, rakyat sebagai *principal* mengerahkan faktor produksi dalam kaidah keuangan berupa pungutan daerah bersama sumber daya manusia untuk pemerintah daerah sebagai *agent*. Komponen ini kemudian diolah dan dimanfaatkan pelaksana mandat rakyat dalam memberikan regulasi dan pelayanan publik secara bijak.

Secara praktis, aktivitas perekonomian dengan keterlibatan masyarakat juga berpengaruh pada total penerimaan daerah. Penarikan pajak, pungutan retribusi, serta penyertaan modal pada perusahaan swasta dan BUMD sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan langsung memberikan dampak pada peningkatan

PAD di suatu daerah. Hal ini dibuktikan dengan capaian rata-rata realisasi PDRB tahun 2015—2019 sebesar Rp36.472,24 miliar.

Seperti halnya PAD, sekalipun pertumbuhan ekonomi melalui proksi PDRB atas dasar harga konstan pada Jawa dan Bali selalu meningkat setiap tahunnya, beberapa masalah ketimpangan sejatinya masih terjadi. Dominasi capaian kabupaten terhadap kota serta wilayah Jawa terhadap Bali sebesar 96,67% diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk melakukan pemerataan dengan menciptakan kebijakan untuk mengurangi eksistensi *market failure*. Sebagai pelaksana ekonomi, pemerintah daerah perlu memastikan terlaksananya penyediaan barang dan jasa publik (fungsi alokasi), terciptanya kesetimbangan perdagangan (fungsi stabilisasi) dan terselenggarakannya pemberian subsidi secara adil dan merata (fungsi distribusi) sebagai katalisator aktivitas perekonomian dalam menciptakan optimalisasi terhadap penerimaan daerah.

Analisis Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengujian ini berhasil membuktikan keberadaan pengaruh signifikan atas masing-masing dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Adapun pembahasan lebih lanjut terkait ketiga hipotesis ini dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengaruh DAU pada Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian DAU terhadap pertumbuhan ekonomi telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan serta selaras dengan penelitian Elsilvera dan Abdillah (2017). Penyaluran DAU telah sesuai dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal sesuai dengan fungsi alokasi pemerintah. Mekanisme transfer ini juga merupakan bagian dari pelimpahan kekuasaan dalam lingkup sumber-sumber keuangan pemerintah pusat (*principal*) kepada pemerintah daerah (*agent*) untuk menjalankan fungsi otonomi daerah. Lebih lanjut, Sulaeman dan Silvia (2019) mengemukakan adanya regulasi terkait alokasi 25% DAU untuk belanja pembangunan infrastruktur yang dimulai sejak 2017 untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi regional.

Pengaruh positif DAU pada pertumbuhan ekonomi nyatanya belum mampu menanggulangi permasalahan ketimpangan alokasi porsi DAU pada kabupaten dan kota di Jawa Bali. Artinya, peran DAU sebagai penyetara horizontal untuk mengakomodasi kebutuhan fiskal dan prioritas daerah di luar kapasitas yang tersedia belum dapat teroptimalisasi dengan baik. Atas dasar tersebut, pemerintah diharapkan untuk lebih mendukung penyaluran dan pemanfaatan DAU agar lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran untuk membiayai belanja daerah. Pada akhirnya, penggunaan belanja tersebut untuk indikator terkait seperti luas wilayah, kependudukan, pembangunan manusia, dan infrastruktur mampu berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi regional.

2. Pengaruh DAK pada Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian DAK terhadap pertumbuhan ekonomi berlawanan dengan hipotesis yang diajukan. Fluktuasi tren DAK Fisik pada wilayah Jawa dan Bali disebabkan oleh peristiwa *lag* atau tertundanya keberdampakan realisasi DAK terhadap pertumbuhan ekonomi melebihi satu tahun anggaran. Sesuai hasil penelitian

Suputra dan Dewi (2017), penurunan perekonomian melalui DAK disebabkan oleh alokasi DAK Fisik pada sektor belanja yang hanya menyentuh infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, DAK Nonfisik lebih banyak dimanfaatkan sebagai tunjangan PNSD, dana BOS, serta anggaran perencanaan kesehatan keluarga yang belum berdampak langsung pada perekonomian (Elsivera dan Abdillah, 2017).

Selain keterlambatan penerbitan juknis dari Kementerian Teknis, belum terpenuhinya standar kinerja pemerintah daerah akibat persyaratan penyaluran yang cukup rumit seperti pelaporan rewiu APIP per capaian bidang dari segi serapan anggaran dan output juga mendukung penyalutan DAK yang tidak disiplin waktu bahkan gagal dicairkan (Aprijon, 2019). Permasalahan birokrasi yang terhambat juga ditemukan ketika pemerintah daerah terlambat melaporkan administrasi pengajuan DAK kepada instansi pusat (Sulaeman & Andriyanto, 2021). Hal ini berimplikasi pada belum optimalnya eksekusi belanja produktif dan sesuai prioritas pembangunan melalui DAK untuk mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Atas terjadinya berbagai permasalahan ini, baik pemerintah pusat maupun daerah perlu memperbaiki sistematisasi birokrasi terkait penyaluran DAK. Alokasi yang ditetapkan menggunakan basis proposal seharusnya mampu menjamin ketepatan penyaluran, kesesuaian anggaran serta kepatuhan terhadap peraturan. Untuk itu, kemudahan pengadministrasian serta terlaksananya pengawasan dalam mekanisme ini perlu dilaksanakan dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dengan diminimalisasinya asimetri informasi dan permasalahan desentralisasi fiskal ini, diharapkan DAK dapat berperan lebih baik sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi.

3. Pengaruh DBH pada Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian DBH terhadap pertumbuhan ekonomi telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan serta selaras dengan penelitian Rahmah dan Zein (2016). Berdasarkan teori federalisme fiskal, otoritas pemerintah yang lebih berwenang (pemerintah pusat) melimpahkan keuangan publik kepada tingkat di bawahnya (pemerintah daerah). Dalam hal ini, penyaluran DBH dari pusat sebagai perimbangan penerimaan potensi daerah dilakukan untuk mendukung lebih banyaknya pendapatan yang berasal dari pajak dan SDA. Seperti halnya dengan DAU, Sulaeman dan Silvia (2019) memaparkan kebijakan 25% dari DBH sebagai modal belanja pembangunan infrastruktur untuk membantu peningkatan ekonomi regional.

Akan tetapi, nilai DBH dapat dikatakan paling rendah dibandingkan dana perimbangan lain. Tendensi peningkatan realisasi DBH Jawa dan Bali gagal dipertahankan pada tahun 2019 akibat terlambatnya pencairan dana tiap tiga bulan sekali memberikan sinyal pada pemerintah untuk terus mengawal pelaksanaan alokasi DBH kepada daerah. *Monitoring* dan evaluasi senantiasa perlu dilakukan untuk menjaga ketertiban administras, demikian pula dengan optimalisasi pajak dan SDA. Hal ini perlu dilaksanakan agar DBH dapat berperan maksimal dalam fungsinya sebagai penyeimbang vertikal serta pendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Analisis Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian ini memberikan hasil yang berbeda pada pembangunan sektor fisik (belanja modal) dan pembangunan sektor manusia (IPM) terhadap pertumbuhan

ekonomi. Adapun pembahasan lebih lanjut terkait kedua hipotesis ini dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengaruh Belanja Modal pada Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian negatif dan tidak signifikan pada belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi berlawanan dengan hipotesis yang diajukan. Suputra dan Dewi (2017) menjelaskan alasan tidak berpengaruhnya belanja modal pada pertumbuhan ekonomi lantaran pelayanan serta fasilitas belum dapat dinikmati dalam waktu singkat. Diterapkannya *lag 2* tahun seperti pengujian Sulaeman & Silvia (2019) pada penelitian ini belum berdampak masif pada pertumbuhan ekonomi akibat realisasi belanja modal yang kurang produktif untuk pembangunan properti yang tidak dapat memberikan penerimaan daerah. Mangkraknya infrastruktur serta sarana prasarana yang masih dibangun membuat kemungkinan manfaat yang dirasakan masyarakat memakan periode anggaran yang lebih lama.

Penyebab lain terkait hal ini dapat dilihat pada banyaknya proyek *multiyears* yang belum berhasil menyerap anggaran. Alokasi belanja modal dari APBN/D di daerah Jawa dan Bali hanya berkisar pada 18,9%—21,34% atas total belanja daerah. Hal ini dikarenakan kebutuhan proyek 2015—2019 sebesar Rp4.769 T sebagian besar ditutupi oleh skema KPBU dan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (Angriani, 2018). Selaras dengan hal tersebut, Sofi (2020) memperkirakan 75,6% pembiayaan pembangunan infrastruktur direalisasikan oleh KPBU/BUMN/Swasta/Masyarakat/PSO dan hanya menyisakan 24,4% untuk porsi APBN/D. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan di luar pendanaan pemerintah lebih memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan dari pemerintah.

Atas hasil penelitian ini, pemerintah diharapkan mampu menjamin tepatnya alokasi terkait belanja modal pada fasilitas yang produktif. Seluruh tahap pengadaan yang dimulai dari perencanaan, persetujuan kontrak, eksekusi, serta *monitoring* dan evaluasi terkait proyek tahun jamak sepatantasnya dipantau secara cermat sehingga tidak lagi terjadi keterlambatan proyek *multiyears*. Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, diharapkan pemerintah dapat menjamin ketersediaan sarana prasarana yang berhasil memberikan pengaruh pada kesejahteraan dan pada akhirnya, sektor pembangunan fisik ini akan mampu menghasilkan manfaat baik bagi perekonomian.

2. Pengaruh IPM pada Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian IPM terhadap pertumbuhan ekonomi telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan serta selaras dengan penelitian Ezkianto & Findi (2013) yang menguji hubungan interaksi IPM dengan pertumbuhan ekonomi. IPM sebagai parameter tingkat kesejahteraan masyarakat memiliki signifikansi dalam pengelolaan SDA, permodalan finansial, dan kestabilan politik. Pemerintah daerah selaku *agent* pelaksana mandat otonomi daerah dari pemerintah pusat selaku *principal* berperan penting dalam meningkatkan komponen IPM yang terdiri dari angka harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, angka harapan hidup saat lahir, dan rata-rata lama sekolah untuk memastikan keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, rata-rata IPM Jawa—Bali selama 5 tahun berkisar pada angka 69,99%—72,36%. Artinya, kualitas pembangunan manusia secara umum di Jawa dan

Bali dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian telah mampu dikatakan mandiri dan sejahtera. Akan tetapi, akses pendidikan, angka harapan hidup, serta standar kelayakan hidup belum dapat dikatakan sepenuhnya merata. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan terus berupaya dalam memperbaiki kesenjangan pada aspek kualitas manusia ini. Di samping itu, digunakannya IPM sebagai salah satu komponen yang menentukan besaran DAU mengindikasikan bahwa pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas SDM dengan menyusun kebijakan yang mendukung. Dengan demikian, diharapkan IPM sebagai proksi pembangunan manusia dapat menjadi efek pengganda yang diunggulkan dalam menentukan kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Analisis Indikator Sosial terhadap PAD

Penelitian ini memberikan hasil yang berbeda pada indikator sosial seperti jumlah penduduk dan tenaga kerja pada penerimaan asli daerah. Adapun pembahasan lebih lanjut terkait kedua hipotesis ini dijelaskan sebagai berikut

1. Pengaruh Jumlah Penduduk pada PAD

Hasil pengujian jumlah penduduk terhadap PAD berlawanan dengan hipotesis yang diajukan, tetapi telah sesuai dengan hasil penelitian Kusuma (2014) yang mengamati pengaruh negatif jumlah penduduk terhadap PAD pada 33 Provinsi di Indonesia. Bonus demografi Jawa dan Bali justru membebani pembangunan yang berlangsung lantaran belum meratanya kualitas manusia yang tersebar apabila ditentukan dalam skala IPM. Aprianoor & Muktiali (2015) mengemukakan kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya keberagaman ukuran wilayah kabupaten dan kota, perbedaan kualitas pembangunan fisik dan manusia, serta ketimpangan pada layanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah menanggung isu sosial seperti pengangguran dan kemiskinan yang hingga kini belum mampu sepenuhnya diatasi akibat masifnya permasalahan ini di berbagai daerah. Program pemerintah akan terhambat seiring dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan penerimaan daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi melimpahnya SDM ini dengan meningkatkan serta melakukan pemerataan kualitas hidup manusia. Pemerintah daerah juga dapat mengedukasi masyarakat terkait optimalisasi PAD serta implikasinya pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pengelolaan regulasi untuk mengikutsertakan masyarakat dalam aktivitas perekonomian juga diharapkan dapat mendukung lebih banyak pendapatan asli daerah.

2. Pengaruh Tenaga Kerja pada PAD

Hasil pengujian tenaga kerja terhadap PAD telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan serta selaras dengan penelitian Muchtolifah (2010) dan Koesmulyadi (2017). Adam Smith dalam Todaro (2000) mengemukakan bahwa perluasan penduduk yang menambah tenaga kerja akan meningkatkan perekonomian sebab perannya sebagai faktor produksi bersama manajemen, SDA, modal, dan TI mampu memperluas pasar. Peran tenaga kerja juga dapat dihubungkan dengan *agency theory* dengan peran masyarakat (*principal*) untuk menyalurkan kemampuan teknis dan keterampilan nonteknis agar dapat dikelola lebih lanjut oleh pemerintah daerah (*agent*) untuk

menggerakkan perekonomian yang selanjutnya berimplikasi pada meningkatnya penerimaan daerah.

Peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk dan tenaga kerja pada cakupan wilayah Jawa dan Bali menunjukkan lebih banyaknya sektor bisnis yang memperlebar kesempatan kerja dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, penerimaan per kapita yang didapat oleh pekerja dalam lingkup Jawa–Bali beserta penerimaan usaha yang ada mampu memberikan akumulasi signifikan pada penerimaan PAD. Atas dasar hal tersebut, pemerintah daerah dapat mengintervensi keberlangsungan perekonomian ini dengan mengupayakan pendampingan, pembinaan, dan pelaksanaan diklat bagi pekerja. Hal ini dapat dijalankan sebagai usaha pemerintah daerah meningkatkan kualitas tenaga kerja pada tingkat terdidik dan terampil agar mampu memaksimalkan penerimaan daerah dengan lebih baik.

Analisis Komponen PAD terhadap PAD

Pengujian ini berhasil membuktikan keberadaan pengaruh signifikan dan positif atas komponen PAD (pajak daerah serta retribusi daerah) terhadap penerimaan asli daerah. Adapun pembahasan lebih lanjut terkait kedua hipotesis ini dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap pada PAD

Hasil pengujian pajak daerah terhadap PAD telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan serta selaras dengan penelitian Kusuma dan Wirawati (2013), Pramarta dan Aswitari (2018), serta Rochimah *et al.* (2015). Sebagai *principal*, rakyat memberikan sumber daya keuangan mereka berupa penarikan pajak kepada *agent*, yaitu pemerintah daerah, untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam hal ini, pajak yang dipungut memberikan implikasi yang tidak instan terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi dapat dinikmati melalui pelayanan publik dan penyediaan fasilitas yang baik. Pulau Jawa dan Bali memberikan kontribusi terbesar atas pajak daerah mengingat perindustrian dan pariwisata yang berlangsung dengan baik. Akan tetapi, ketimpangan realisasi pajak di daerah kabupaten masih terjadi.

Sebagai penyusun mayoritas terkait pendapatan asli daerah, intensifikasi terkait pajak daerah perlu dimaksimalkan dengan baik. Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat melakukan penyuluhan dalam rangka menumbuhkan kesadaran melaporkan pajak, meningkatkan sistem administrasi dan kualitas pembukuan dengan basis teknologi, serta terus memperbaiki tata kelola terkait mekanisme penarikan pajak di dalam organisasi pemerintah. Ketika intensifikasi telah berhasil diupayakan, peran serta ekstensifikasi pajak daerah juga dapat secara beriringan dikondisikan melalui pemberian kemudahan regulasi objek pajak, pembaruan investasi pada subjek dan objek pajak potensial, serta penggalan objek pajak terbaru yang harus disesuaikan dengan kemampuan rakyat dalam membayar pajak. Dengan demikian, diharapkan optimalisasi pajak daerah dapat lebih mendukung peningkatan nilai realisasi PAD.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap pada PAD

Hasil pengujian retribusi daerah terhadap PAD telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan serta selaras dengan penelitian Kusuma dan Wirawati (2013) dan Rochimah *et al.* (2015). Seperti halnya pada pajak daerah, masyarakat (*principal*) menyetorkan retribusi daerah untuk pemerintah daerah (*agent*) sebagai sumber daya keuangan yang dapat dikelola untuk mendukung fungsi pemerintahan. Perbedaan keduanya terletak pada manfaat langsung yang diterima oleh masyarakat setelah pemberian retribusi. Perlakuan kontraprestasi ini dianggap sebagai pengembalian manfaat yang relevan penggunaannya dalam skala jangka pendek (Mardiasmo, 2004 dalam Horota *et al.*, 2017)

Meskipun demikian, masih terhadap *gap* yang sangat besar pada nilai realisasi retribusi daerah apabila dibandingkan dengan pajak daerah. Sekalipun sama-sama menjadi komponen penyusun PAD, porsi retribusi daerah yang masih berada jauh di bawah realisasi pajak daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah juga harus mampu melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi terkait retribusi daerah. Optimalisasi ini juga harus memperhatikan kesediaan rakyat dalam membayar pungutan, menyelaraskan paham antara pemerintah pusat dan daerah yang disertai dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan retribusi daerah dapat lebih berperan signifikan dalam meningkatkan nilai PAD.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan resiprokal pada pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, pertumbuhan ekonomi mendukung peningkatan PAD, demikian pula dengan peningkatan PAD yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. DAU dan DBH sebagai dana perimbangan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi *vertical* dan *horizontal gap* di daerah. Akan tetapi, penyaluran DAK justru menurunkan pertumbuhan ekonomi yang salah satunya diakibatkan oleh terhambatnya administrasi *proposal based*. Belanja modal dengan *lag* 2 tahun belum mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi akibat sumber pembiayaan yang lebih banyak menggunakan skema BUMN/KPBU/Masyarakat/Swasta dibandingkan APBN. Di sisi lain, pembangunan manusia telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Bonus demografi pada jumlah penduduk menjadi beban pembangunan yang menurunkan penerimaan daerah, sedangkan tenaga kerja secara produktif dalam lingkup Jawa dan Bali mampu berimplikasi pada terdongkraknya pendapatan daerah. Demikian halnya dengan pajak daerah dan retribusi daerah ketika keduanya telah berhasil berpengaruh secara kuat untuk mendukung lebih tingginya penerimaan asli daerah.

Atas didapatkannya pengaruh yang saling timbal balik pada pertumbuhan ekonomi dan PAD berikut faktor-faktor yang menyertainya, penulis menyarankan bahwa pemerintah daerah dapat lebih mengusahakan penurunan ketimpangan perekonomian dan penerimaan dengan memahami potensi dan karakteristik daerah agar mampu dikelola dengan lebih baik. Pengalokasian yang tepat guna secara administratif maupun teknis perlu dilaksanakan untuk seluruh mekanisme transfer

dana perimbangan. Pemanfaatan belanja modal harus dapat dipastikan produktif dengan memperhatikan setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga *monitoring* dan evaluasi. Demikian pula dengan aspek pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat. Optimalisasi terkait sumber daya manusia yang melimpah perlu terus dibina agar kelak tidak menjadi beban keuangan pemerintah, misalnya dengan mengupayakan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja. Intensifikasi dan ekstensifikasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah harus dilaksanakan dengan menyelaraskan paham pemerintah, memperhatikan kesediaan rakyat, serta menyesuaikan dengan koridor perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini masih terbatas pada ruang lingkup Jawa dan Bali dengan tidak mengikutsertakan periode terjadinya wabah Covid-19 yang mengubah struktur anggaran. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengakomodasi wilayah di luar Jawa dan Bali serta mencakup tahun 2020-2021 agar meningkatkan relevansi dan lebih menggambarkan realitas saat ini. Transformasi data dalam bentuk *first differencing* dan *natural logarithm* dibandingkan data asli dapat diterapkan dalam penelitian untuk memberikan implikasi yang berbeda. Selain itu, penggunaan jenis realisasi belanja lain selain belanja modal serta pemisahan jenis DAK dibandingkan satu kesatuan dapat pula diterapkan untuk penelitian selanjutnya. Demikian pula penggunaan variabel kontrol yang tidak terbatas pada ukuran, lokasi, dan jenis pemerintah berikut penggunaan variabel lain sebagai *intervening* dan mediasi dalam penelitian selanjutnya agar menghasilkan *output* pengujian yang lebih tepat dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Angriani, D. (2018, January 18). *PINA Lanjutkan Pembiayaan 34 Proyek Infrastruktur Senilai Rp344,3 Triliun - Medcom.id*. medcom.id. <https://www.medcom.id/ekonomi/>
- Aprijon, A. (2019, October 31). Menyelisik DAK Fisik. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menyelisik-dak-fisik/>
- Aprianoor, P., & Muktiali, M. (2015). Kajian ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Teknik PWK*,4(4), 484-498.
- Astuti, I. A. P., & Astika, I. B. P. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3), 2416–2446.
- Bati. (2009). *Pengaruh Belanja Modal dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. USU Medan.
- Batik, K. (2013). Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, ii(J. Ekon. Pembang.), 115–140.
- Boediono, D. (1981). Teori Pertumbuhan Ekonomi. In *BPEF Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta. Bpfe. <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Teori+Pertumbuhan+Ekonomi#8>

- BPS. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia*.
<https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Chandra, P. (2013). Theory of Fiscal Federalism : An Analysis. *MPRA Munich Personal RePec Archive*.
- Christy, F. A., & Adi, P. H. (2009). Hubungan Antara DAU, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. *The 3rd National Conference UKWMS, October*, 1–16.
- Davies, A., & Quinlivan, G. (2006). A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human Development. *Journal of Socioeconomics*.
- Dengah, S., Rumat, V., & Niode, A. (2014). Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Permintaan Perumahan Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(3), 71–81.
- Desmawati, A., Zamzami, & Zulgani. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(1), 49–58. <https://online-journal.unja.ac.id/JES/article/view/2638/pdf>
- Eisenhardt, M. K. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Elsivera, E., & Abdillah, W. (2017). Mediating Effect of Capital Expenditure on the Effect of Revenues, Allocation Fund, and Tax/Nontax Sharing on Economic Growth (Empirical Study of Regencies in Bengkulu Province Period of 2009-2015). *AFEBI Management and Business Review*, 2(02), 43. <https://doi.org/10.47312/ambr.v2i02.104>
- Ernati. (2009). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*, 3(2), 189–215.
- Fadli, F. (2017). Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah? *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 16(2). <https://doi.org/10.20961/jiep.v16i2.2312>
- Firmansyah, A., Setiawan, T. A., & Fathurahman, F. (2020). Nilai Perusahaan: Kebijakan Utang, Good Corporate Governance, Cash Holding. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 20(2), 237–254.
- Gujarati, D. (2012). *Ekonometrika Dasar*. Erlangga.
- Halim dan Abdullah. (2006). Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64.
- Hibzon. (2007). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 106–116.
- Horota, P., Riani, I. A., & Marbun, R. M. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Keuda*, 2(1), 1–10.
- Imamah, N. (2018). Dampak Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Persamaan Simultan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 3(2), 51–65. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/12496>
- Jonnadi, A., Amar, S., & Aimon, H. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan

- Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1), 7098.
- Koesmulyadi, R. (2017). *Pengaruh PDRB, Tenaga Kerja dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2004 – 2013*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Kresnandra, A. A. N. A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 44–63.
- Kusuma, M. K. A. A., & Wirawati, N. G. P. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(3), 574–585.
- Latif, M. K., & Soesatyo, Y. (2014). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerjam dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi DI Kabupaten Kediri. *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, 1–16.
- Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. In *Serial otonomi daerah*. Andi.
- Maulana, R. (2015). Pengaruh Human Capital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *Economics Development Analysis Journal*, 4(2), 159–165. <https://doi.org/10.15294/edaj.v4i2.6734>
- Mirza, D. S. (2011). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Ipm Jawa Tengah. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Ipm Jawa Tengah*, 4(2), 102–113. <https://doi.org/10.15294/jejak.v4i2.4645>
- Nalle, F. W., & Hidayat, A. S. (2015). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 72–86.
- Nisa, A. A. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 203–214.
- Nusa, A., Falah, S., & Wamafma, I. K. (2015). Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo. *Jurnal Keuda*, 2(3), 1–17.
- Park, S., Park, M. G., & Nam, K. M. (2019). Growth effects of fiscal decentralization with weak economic motivation: the case of South Korea. In *Annals of Regional Science* (Vol. 63, Issue 3). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/s00168-019-00936-9>
- Pradana, A. N., & Sumarsono, H. (2018). Human Development Index, Capital Expenditure, Fiscal Desentralization to Economic Growth and Income Inequality in East Java Indonesia. *Quantitative Economics Research*, 1(2), 108–118. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=847324&val=11410&title=Human Development Index Capital Expenditure Fiscal Desentralization to Economic Growth and Income Inequality in East Java Indonesia>
- Pradnyantari, P. M., & Dwirandra, A. A. N. B. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Ipm Dengan Variabel Pemoderasi Dana Alokasi Umum. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(1), 536–564.
- Pramartha, A., & Aswitari, L. P. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan

- Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud-*, 7(8), 1767–1795.
- Prana, R. R. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilman*, 4(1), 74–86.
- Priambodo, A. (2015). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. 4(1), 1–9.
- Priyono, N. (2016). Analisis Faktor- Faktor yang Berpengaruh terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kota Magelang Periode Tahun 2001-2010). *E-Jurnal EP Unud-*, 2, 13–26.
- Rahmad, R., Zulham, T., & Seftarita, C. (2019). the Analysis of Local Revenues and the Affecting Factors in the Implementation of Regional Autonomy in Aceh Province. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 6(1), 87–103. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v6i1.14260>
- Rahmah, A.R., & Zein, B. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh*. 1(1), 213–220.
- Rahman, F. (2012). Desentralisasi Fiskal dan Minimnya Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik UNISMA*, 1(2).
- Rahman, Y. A., & Chamelia, A. L. (2015). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pdrb Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *Jejak*, 8(1), 88–99. <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3857>
- Ramirez, A., Ranis, G., & Stewart, F. (1988). Economic Growth and Human Capital. *QEH Working Paper No. 18*.
- Rochimah, S., Kharis, R., & Abrar, O. (2015). Pengaruh Pajak Hotel & Restoran, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 – 2012. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa SI Akuntansi Universitas Pandanaran ISSN : 2502-7697*, 1(1), 1–9.
- Rostow, & Musgrave. (1996). *Economic development planning*. Raja Grafindo Pustaka.
- Rosyidi, S. (2000). *Pengantar Teori Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ryan Ezkirianto dan M. Findi A. (2013). Analisis Keterkaitan antara Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB per Kapita di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, Hlm. 14-29 Vol. 2 No. 1*, 2(1), 14–29.
- Sabilla, K., & Jaya, W. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional Di Indonesia. *JESP: Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 15(1), 12–22. <https://doi.org/10.18196/jesp.15.1.1233>
- Said, R. (2012). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial.
- Santoso, F. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2015-2016*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Santoso, P. B., & Rahayu, R. P. (2005). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri. *Dinamika Pembangunan*, 2(1), 9–18.

- Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. *None*, 38, 1999–2007. https://books.google.co.id/books?id=RC-hAAAACAAJ&dq=Desentralisasi+Fiskal+dan+Keuangan+Daerah+dalam+Otonomi&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiI5bydkZ7tAhX9FbcAHcH_DZcQ6AEwAHoECAAQAQ
- Sidik, M. (2002). *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*. Seminar Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.
- Sofi, I. (2020, May 4). *Pilihan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Makin Luas*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/pilihan-pembiayaan-infrastruktur-daerah-makin-luas/>
- Subri, M. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. PT RajaGrafindo.
- Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik sampai Keynesian*. Lembaga Penerbit FE-UI.
- Sulaeman, A. S., & Andriyanto, N. (2021). *Optimalisasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Mendorong Pertumbuhan Pembangunan Daerah di Indonesia*. 5(2), 175–200.
- Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, Dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(1), 97–112. <https://doi.org/10.29303/jaa.v4i1.61>
- Suputra, I. D. G. D., & Dewi, N. W. R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1745–1773. <https://doi.org/10.24176/agj.v1i1.3321>
- Susanti, S. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jmi.v9i1.9374>
- Susanto, I. (2014). Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Kota Malang Tahun 1998 – 2012). *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*, 2(2), 1–16.
- Tanzi, V. (1995). Fiscal federalism and decentralization: a review of some efficiency and macroeconomic aspects. In M. Bruno and B. Pleskovic (eds). *Annual World Bank Conference on Development Economics 1995*.
- Todaro, P. M. (2000). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Penerbit Erlangga.
- Vo, D. H. (2010). The Economics of Fiscal Decentralization. *Journal of Economic Surveys*, 24(4), 657–679.
- Widjaja, H. (2002). *Otonomi daerah dan Daerah Otonom*. Raja Grafindo Persada.
- Zhang, T., & Zou, H. (1998). Fiscal Decentralization, Public Spending, and Economic Growth in China. *Journal of Public Economics*.